

Anomali Pembangunan Pedesaan

INDONESIA sesungguhnya adalah negara pedesaan, dan dapat dilihat dari perbandingan wilayahnya, yaitu 80% desa dan 20% kota. Saat ini komposisi penduduk adalah 58% warga desa dan 42% warga kota. Pada 1980-an perbandingan penduduk desa : kota bahkan mencapai 80%:20%.

Oleh **Sutiyo**



Namun data itu sangat kontras jika dibandingkan data komposisi PDB Indonesia. Mengacu data BPS, kontribusi sektor pertanian yang identik dengan pedesaan terhadap PDB

hanya berkisar 15% per tahun, dan pertumbuhan sektor pertanian sekitar 4-5% per tahun, atau selalu lebih rendah dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional yang berkisar 6% per tahun.

Sekitar 63% dari 32 juta masyarakat miskin Indonesia pada tahun 2009 tinggal di desa. Dilihat dari ketersediaan infrastruktur sosial dan ekonomi, 45% desa di Indonesia masih termasuk kategori desa tertinggal.

Kondisi ini pada dasarnya disebabkan oleh ketidakberpihakan kebijakan pemerintah terhadap pedesaan. Selama Orba berkuasa, pemerintah melaksanakan kebijakan pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini memang menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan tinggi, rata-rata di atas 7%. Namun hal itu tidak dibarengi dengan pemerataan hasil pembangunan.

Sumber daya pembangunan hanya mengalir ke sebagian kecil masyarakat, yaitu elite di kota. Asumsi bahwa keberhasilan ekonomi para elite akan menetes kepada masyarakat bawah ternyata tidak terbukti, dan jurang antara kaya dan miskin makin melebar.

Reformasi 1998 sebetulnya merupakan momentum yang tepat untuk mengoreksi dan melahirkan kebijakan pembangunan Indonesia yang lebih propedesaan. Sayangnya, momentum itu tidak dapat ditangkap dengan baik.

Contohnya, dengan kegagalan kebijakan

pembangunan berorientasi pertumbuhan selama Orba, apakah pemerintahan di era reformasi telah melakukan langkah nyata untuk meningkatkan pemerataan hasil pembangunan? Perputaran uang dan kegiatan ekonomi masih berpusat di kota besar, terutama Jakarta, dan desa tetap menjadi bagian terabaikan dalam kebijakan pembangunan.

Reformasi juga melahirkan otonomi daerah (otda), tetapi sudahkah pemerintah desa mendapatkan hak otonominya secara penuh? Jika dicermati, otda di Indonesia lebih fokus di tingkat kabupaten/ kota.



Perdebatan mengenai desentralisasi juga lebih sering menyangkut isu kewenangan, keseimbangan keuangan, dan dinamika politik lokal, tidak mengait bagaimana membuat otda mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diberi Kepercayaan

Pada era otda, rata-rata kabupaten/ kota menghabiskan 70% APBD untuk membiayai pengeluaran rutin, dan hanya 30% dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Angka 30% APBD ini pun belum tentu secara efektif mengalir ke masyarakat.

Otda sangat rentan terhadap fenomena "penyerobotan elite" (*elite capture*), yaitu kondisi di mana keuntungan otda hanya dinikmati segelintir elite di tingkat lokal. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah mengindikasikan hal ini.

Pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan pembangunan yang dilakukan selama ini. Setidaknya ada dua hal yang dapat dijadikan indikator keseriusan pemerintah dalam melakukan pembangunan pedesaan.

Pertama; meningkatkan jumlah anggaran pembangunan untuk wilayah pedesaan sekaligus memperbaiki pengelolaannya. Karena mayoritas masyarakat desa bekerja di sektor pertanian maka sektor ini harus mendapat perhatian lebih serius.

Koordinasi lintas departemen dan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di pedesaan harus ditingkatkan. Pemerintah harus mulai memikirkan sistem pembangunan yang mampu mengintegrasikan bermacam-macam program kementerian sektoral dan pemerintah daerah. Dengan integrasi ini, kemiskinan dapat ditangani secara lebih komprehensif dan pembangunan akan lebih efisien dari segi dana ataupun personel.

Kedua; memperkuat desentralisasi di tingkat desa. Pemerintah desa harus diberi kepercayaan menjalankan kewenangan pemerintahan dan perimbangan keuangan yang lebih besar. Penguatan pemerintah desa dalam hierarki pemerintahan diharapkan mempercepat penyelesaian permasalahan pembangunan. (10)

— **Sutiyo SSTP MSi**, perangkat Kelurahan Kedungmenjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, mahasiswa program doktoral pada *International Development and Cooperation (Idc)* Hiroshima University Jepang